

SUDAH MENGABDI BELASAN TAHUN

## Ratusan TKD Pemkab Cirebon Keluhkan Minimnya Upah

**CIREBON (IM)**- Ratusan Tenaga Kerja Daerah (TKD) Pemkab Cirebon mengeluhkan minimnya upah yang mereka dapatkan. Keluhan TKD Pemkab Cirebon, itu disampaikan perwakilan mereka kepada Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Rabu (11/5).

Perwakilan TKD Pemkab Cirebon, Taslam mengatakan mereka sudah mengabdikan selama belasan tahun. Saat ini rata-rata usia mereka sudah di atas 35 tahun. Artinya, sangat kecil kemungkinan diangkat ASN.

Untuk itu, mereka meminta upah mereka dinaikkan minimal sama dengan UMK Kabupaten Cirebon. Sementara jumlah TKD sendiri saat ini sekitar 154 orang. "Karena keterbatasan usia kami yang rata-rata di atas 35 tahun, kami minta upah disamakan dengan UMK. Juga ada tunjangan kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan," ungkap Taslam.

Dirinya pun mengeluhkan, sampai saat ini tidak ada sama sekali perhatian dan reward kepada mereka dari Pemkab Cirebon. Padahal, dengan masa kerja yang sudah belasan tahun, harusnya ketika mereka selesai mengabdikan, Pemkab Cirebon bisa memberikan pesangon atau minimal uang kaduadeuh. "Kalau ada yang meninggal dunia juga tidak ada uang duka dari Pemda. Selama kami mengabdikan, perhatian Pemda sangat minim," ungkapnya.

Sementara itu, Sekban BK-PSDM Kabupaten Cirebon, Nanang Ruhya mengaku, sam-

pai saat ini pun pihaknya masih kebingungan dengan regulasi TKD. Malahan informasi yang beredar menyebutkan, pemerintah justru akan mengurangi TKD dan selesai pada tahun 2023.

"Kalau ada tuntutan skala prioritas dan kesejahteraan mungkin kita menunggu regulasi masalah TKD," jelasnya.

Sedangkan perwakilan BKAD, Maman mengaku dalam Keputusan Kemendagri sudah jelas disebutkan, sudah tidak ada istilah tenaga honor ataupun tenaga kontrak. Mata anggarannya pun hanya berbunyi belanja barang dan jasa saja. Artinya, tidak ada untuk anggaran membayar tenaga honor atau kontrak.

"Sebetulnya untuk membayar gaji TKD, mata anggarannya tidak ada karena bunyinya hanya belanja barang dan jasa. Kami harus bagaimana cara menambah upah karena regulasi di keuangan tidak disebutkan," paparnya.

Namun Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Juanaedi meminta Pemkab untuk membuat kebijakan khusus. Dirinya meminta, dalam waktu dekat harus ada solusi namun sesuai aturan. Pemda juga nantinya pasti meminta persetujuan dewan karena tidak bisa memutuskan aturan sendiri.

"Secepatnya Pemda mencari solusi. Jangan sampai terbengkalai karena ini masalah yang cukup lama. Berapa kali kami meminta jumlah total tenaga honor dan TKD ke Pemda, sampai sekarang juga tidak direspon," tukasnya.

● pra

## Hepatitis Akut Mengancam, Seluruh Puskesmas di Kota Bandung Siaga

**BANDUNG (IM)**- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung menyiagakan seluruh puskesmas sebagai langkah antisipasi penyebaran hepatitis akut. Dinkes menyiagakan seluruh puskesmas sebagai antisipasi awal meski belum ditemukan kasus hepatitis akut di Bandung, kata Kepala Dinkes Kota Bandung Ahyani Raksanagara sembari menambahkan, kewaspadaan terus ditingkatkan di tengah merebak kasus hepatitis akut.

Hal itu mengacu kepada surat edaran Kementerian Kesehatan dan World Health Organization (WHO). "Kita sedang waspada. Itu bukan panik, tapi waspada. WHO memberikan warning dan kewaspadaan. Upaya pencegahan adalah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penyakit hepatitis akut dan pencegahannya," kata Ahyani Raksanagara, Rabu (11/5).

Ahyani Raksanagara menyebutkan, penularan penyakit hepatitis akut terjadi melalui mulut. Upaya pencegahan yang

dilakukan, di antaranya dengan menjaga perilaku saat makan, seperti mencuci tangan dan makanan yang dimakan harus matang dan bersih.

"Antisipasi tadi, nomor satu masyarakat harus paham. Penyakit dapat terjadi apabila tidak menjaga perilaku kita saat makan, sebelum makan, menyiapkan makanan dan memilih makanan. Kita juga lakukan sosialisasi ke puskesmas agar tidak gagap saat menangani kasus," ucapnya.

Ahyani pun mengaku telah menyosialisasikan hal tersebut ke tingkat kewilayahan seperti camat dan lurah agar waspada terhadap hepatitis akut.

Namun masyarakat, kembali diminta untuk tidak panik menyikapi hal tersebut. "Jangan panik, tapi waspada. Fokus ke pencegahan. Gejala hepatitis akut seperti sakit kuning, di antaranya mual, diare, perubahan warna air kencing seperti teh dan dapat menyebabkan kejang dan penurunan kesadaran apabila tidak diantisipasi sejak dini," ujar dia. ● pra

# 8 Nusantara



IDN/ANTARA

### HALALBIHALAL KEPALA DAERAH SE JAWA BARAT

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersalaman dengan perwakilan kepala daerah saat acara halal bi halal bersama seluruh Kepala Daerah se Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/5). Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menggelar silaturahmi halalbihalal secara tatap muka setelah dua tahun terhenti akibat pandemi COVID-19.

## Ajuan Pemkab Bogor Merevitalisasi Terminal Cibinong Ditolak BPTJ

Warga Cibinong berharap Terminal Cibinong segera direvitalisasi, karena Cibinong sudah bertahun-tahun sebagai ibu kota Kabupaten Bogor, dan Kecamatan Cibinong tidak punya terminal yang bisa dikatakan layak.

**CIBINONG (IM)**- Keinginan Pemkab Bogor melalui Dinas Perhubungan agar Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) merevitalisasi Terminal Cibinong di Tahun 2022 akhirnya kandas. Direktur Prasarana BPTJ,

Jumardi mengatakan bahwa tidak ada rencana pihaknya untuk merevitalisasi Terminal Cibinong di Tahun 2022.

"Tidak ada program revitalisasi Terminal Cibinong oleh BPTJ karena tidak masuk dalam kategori terminal tipe

A," singkat Jumardi kepada wartawan, Rabu (11/5).

Diwawancara terpisah, Kepala Dishub Kabupaten Bogor, Agus Ridho mengaku menunggu analisa BPTJ terkait pengajuan atau permohonan revitalisasi Terminal Cibinong.

"Dishub Kabupaten Bogor sudah mengajukan permohonan revitalisasi Terminal Cibinong ke BPTJ, karena di Kabupaten Bogor anggarannya terbatas, kami berharap ada dana dari pemerintah pusat untuk membiayai proyek tersebut," kata Agus Ridho.

Kabid Prasarana Dishub Kabupaten Bogor, Hedi Heryadi menambahkan dengan

direvitalisasi,

Terminal Cibinong akan ada pengaspalan, penataan kios, halte dan sarana prasarana lainnya. "Mudah-mudahan tahun ini BPTJ menyetujui dan membiayai revitalisasi Terminal Cibinong yang walaupun terminal tipe C tapi pelayanannya sudah tipe A, kami juga siap apabila diminta membuat detail engineering design (DED)," tambah Hedi Heryadi.

Sementara itu Bayu Kurnia, warga Cibinong berharap Terminal Cibinong segera direvitalisasi, karena sudah bertahun-tahun sebagai ibu kota Kabupaten Bogor, Kecamatan Cibinong tidak punya terminal yang bisa dikatakan layak

"Kios tempat kuliner, aspal dan sarana prasarana Terminal Cibinong sudah sangat tidak layak, bahkan tidak ada halte hingga kalau terjadi hujan, penumpang pun terpaksa biaya revitalisasi Terminal Cibinong yang walaupun terminal tipe C tapi pelayanannya sudah tipe A, kami juga siap apabila diminta membuat detail engineering design (DED)," tambah Hedi Heryadi.

Sementara itu Bayu Kurnia, warga Cibinong berharap Terminal Cibinong segera direvitalisasi, karena sudah bertahun-tahun sebagai ibu kota Kabupaten Bogor, Kecamatan Cibinong tidak punya terminal yang bisa dikatakan layak

## Plt Bupati Bogor Janjikan Betonisasi Jalan Warung Borong-Rancabungur

**CIBINONG (IM)**- Peningkatan ruas Jalan Warung Borong-Rancabungur (Pasar Ciampea) di Kecamatan Ciampea akan dilaksanakan paling cepat pada pertengahan Juni 2022. Rencana jalan tersebut berupa betonisasi dilakukan sepanjang 2,3 KM dengan lebar sesuai existing dengan anggaran Rp.7.994.247.750. Masyarakat diminta bersabar karena pengerjaan tersebut harus melalui prosedur yang berlaku.

Hal ini menanggapi aksi demo warga Ciampea. Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan menjelaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sudah menganggarkan dana melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUUR) untuk melakukan peningkatan kualitas Jalan Warung Borong - Rancabungur berupa betonisasi

sepanjang 2,3 KM dengan lebar sesuai existing di lapangan.

"Ruas jalan ini, digunakan oleh masyarakat sebagai akses utama ke Pasar Ciampea. Selain itu, masyarakat juga menjadikan jalan ini sebagai jalan alternatif menghindari kemacetan yang kerap terjadi di Jalan Nasional," kata Iwan, kemarin.

Iwan Setiawan menambahkan, saat ini, kegiatan Peningkatan Jalan Warung Borong - Rancabungur sedang berproses sesuai tahapan dan aturan yang berlaku dan akan segera dilaksanakan kegiatannya. Dengan adanya kegiatan perbaikan jalan ini, diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat sekitar.

Selanjutnya, Sub Koordinator Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan, Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Heru Haerudin mengungkapkan, saat ini sudah berproses

dan sudah ada pemenang kelangnya, kini sedang proses penunjukan Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPB).

Menurutnya, penerbitan SP-PBJ ke pelaksanaannya harus melalui jaminan Pelaksanaan dulu, jika sudah ada, lalu kita tanda tangan kontrak, kemudian kita lakukan Peninjauan Lapangan Bersama (PLB), baru dimulai pelaksanaan.

"Insy Allah bisa secepatnya kita laksanakan, perkiraan paling cepat di minggu kedua bulan Juni 2022," terang Heru.

La mengimbau, masyarakat agar bersabar, karena sedang berproses dan sudah ada pemenang. Pengerjaannya harus sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku, pada intinya kami sudah siap melaksanakannya, katanya. ● gio

## Dirut Trans Pakuan Bogor Mengundurkan Diri

**BOGOR (IM)**- Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Trans Pakuan, Lies Permans Lestari, resmi mengundurkan diri. Wali Kota Bogor,

Bima Arya menyebut pengunduran diri tersebut mempertimbangkan faktor keluarga.

"Jadi sekitar sebulan lalu, Bu Lies sampaikan permohonannya untuk mengundurkan diri karena alasan pribadi dan keluarga. Setelah berdialog cukup lama dengan Bu Lies, saya bisa memahami, bisa menerima. Tetapi saya minta Bu Lies menyiapkan dululah, berpikir dululah, berpikir gitu kemudian datang lagi beberapa waktu kemudian

menyampaikan hal yang sama," kata Wali Kota Bogor, Bima Arya kepada wartawan, Rabu (11/5).

Bima menyebut tidak ada perjanjian kerja tertentu sampai kapan waktu menjabat Dirut Trans Pakuan. Jadi bisa mengundurkan diri kapan saja. Meski demikian, Bima meminta Lies menyelesaikan tugasnya serta berkoordinasi dengan pengawas.

"Saya minta Bu Lies minta untuk menyelesaikan dulu tugas-tugasnya, kordinasi dengan pengawas. Kemudian saya mengambil langkah untuk segera menunjuk Plt," ujarnya.

Bima menyebut pengunduran diri Lies bukan terkait kinerja. Se-

bab, menurut Bima, kinerja Lies di Trans Pakuan sangat baik.

"Sebetulnya saya sangat mengapresiasi kinerja Bu Lies itu. Teman-teman di Dishub juga melihat hal yang baik. Capaiannya jelas ya, jadi bukan karena kinerja, kinerjanya baik sekali. Kinerjanya bagus sekali bahkan diapresiasi BPTJ kinerja Bu Lies," tuturnya.

Bima sudah menunjuk pelaksanaan tugas (Plt) Dirut Trans Pakuan. Dia adalah Rachma Nissa, yang telah bergabung dengan Trans Pakuan sejak Februari lalu. "Saya sudah menunjuk Rachma Nissa sebagai Plt Dirut. Bu Nissa ini dari internal, bergabung di Trans Pakuan sejak Februari," jelasnya. ● gio



IDN/ANTARA

### PAMERAN TIPOGRAFI TYPEFEST 2022

Pengunjung melihat-lihat karya tipografi yang dipamerkan pada "Typefest 2022, International Typography Biennial" di Taman Budaya Jawa Tengah (TBJT), Solo, Jawa Tengah, Rabu (11/5). Pemeran yang bertema "Rhetoric of Maxim" tersebut memamerkan 48 karya tipografi dari 31 peserta dari dalam dan luar negeri dan berlangsung hingga 12 Mei mendatang.

## DKPP Jabar Temukan Kasus Penyakit Mulut dan Kuku pada Hewan Ternak

**BANDUNG (IM)**- Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat menemukan penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak. Menurut Kepala DKPP Jabar, Moh Arifin Soedjajana, usai Dinas Peternakan Jawa Timur melaporkan adanya kasus PMK pada Gubernur Jawa Timur, pihaknya langsung berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk mencegah dan mewaspadai adanya temuan kasus PMK.

"Jawa Timur itu melaporkan 5 Mei, dari informasi tersebut, besoknya kami langsung koordinasi dengan daerah agar meningkatkan kewaspadaan, karena ada laporan dari Garut bahwa ada terduga kasus PMK di sana," ujar Arifin, Rabu (11/5).

Arifin menjelaskan, pada 7 Mei DKPP Jabar bersama Tim Balai Veteriner Subang langsung mengambil sampel terduga PMK di Garut. Selain di Garut, pada hari berikutnya sampel juga diambil di lokasi terduga di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Banjar. "Sejumlah sampel terkkonfirmasi 100 persen positif PMK," katanya.

Arifin merinci, kasus PMK positif ditemukan di Leles, Garut sebanyak 25 ekor sapi potong, 3 ekor sapi perah, dan 5 ekor domba. Sementara, Tasikmalaya 18 sampel sapi dinyatakan positif PMK dan 11 ekor sapi di Kota Banjar dinyatakan positif 100 persen PMK.

"Sebelum ada temuan positif 7 Mei, kami sudah membentuk Tim Unit Respon Cepat

PMK," katanya.

Menurut Arifin, pihaknya juga langsung mengeluarkan surat edaran pada kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten/kota Jawa Barat untuk mewaspadai penyebaran PMK.

"Kami juga sudah menggelar rapat koordinasi dengan stakeholder peternakan di Jawa Barat sekaligus inspeksi ke Pasar Hewan Tanjung Sari Sumedang dan Manonjaya, Tasikmalaya," katanya.

Arifin mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan strategi dan rencana penutupan jalur pengeluaran ternak dan pasar ternak. Kemudian penutupan pemasukan media pembawa dan melakukan pengawasan lalu lintas ternak terutama di dua check point Losari dan Banjar. "Dari 1 April-10 Mei ada 5025 sapi potong, 294 domba, 578 kambing, dan 11 kerbau masuk lewat dua check point itu berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali," katanya.

Hingga Selasa (10/5) lalu, kata dia, pihaknya juga aktif melakukan penelusuran dan pencegahan di sejumlah titik sekaligus memperkuat informasi dan sosialisasi terkait PMK hingga vaksinasi dan pengobatan support. "Strategi lain adalah biosecurity dan dekontaminasi," katanya.

Untuk memperkuat pencegahan dan kewaspadaan PMK di Jawa Barat, kata dia, pihaknya tengah menyusun surat edaran Gubernur Jawa Barat untuk Bupati Wali Kota terkait penanganan PMK. ● pra



IDN/ANTARA

### VAKSINASI CEGAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU TERNAK SAPI

Tim kesehatan hewan memeriksa mulut ternak sapi sebelum dilakukan vaksinasi di pasar hewan Desa Sibreh, Kecamatan Sibreh, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Selasa (11/5). Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar hingga Selasa (11/5) menemukan sebanyak 30 ekor ternak sapi terindikasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di daerah itu, sementara kasus tertinggi PMK ternak sapi terjadi di kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 1.767 ekor dalam pengawasaan dan perawatan dan kasus sapi mati sebanyak 16 ekor.